

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah keseluruhan pulau-pulau yang ada mencapai kisaran 17.504 pulau, di mana secara geografisnya akan memiliki keragaman budaya yang beragam. Karena pada dasarnya, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk, di mana masyarakatnya terdiri atas berbagai kelompok-kelompok sosial yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu tempat, namun terpisah secara garis budaya masing-masing (Badan Pusat Statistik, 2017). Jika dilihat dari keadaan wilayahnya yang terdiri dari puluhan ribu pulau, baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil, penyebaran penduduknya masih belum merata di setiap pulau-pulainya. Masih banyak pulau yang kosong maupun sedikit jumlah penduduknya. Oleh karena itu, terjadilah ketidakmerataan penduduk di setiap wilayah, seperti pada Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya ketimbang pulau-pulau besar lainnya (Suparmi, 2020:92). Karena ketimpangan atas ketidakmerataan penyebaran penduduk di Indonesia itu, makanya dibutuhkan sebuah upaya penyelesaian yang bijaksana. Salah satunya program transmigrasi. Program transmigrasi muncul sebagai sebuah program alternatif dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyebaran penduduk yang tidak merata tersebut. Selain untuk mengatasi ketidakmerataan penyebaran penduduk, program transmigrasi juga memiliki tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan cara pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian (Hardjosudarmo, 1965:128).

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemecahan masalah kependudukan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Hardjono, 1982). Transmigrasi dapat dipahami sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah yang padat penduduknya ke area pulau lain yang penduduknya masih sedikit, bahkan belum ada penduduk. Dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, disebutkan di

dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigrasi Indonesia didanai dan diatur oleh pemerintah bagi warga yang umumnya berada pada golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi, para transmigran diberikan sebidang tanah pekarangan atau tanah pertanian untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru, serta diberikan jaminan hidup selama satu tahun.

Pemindahan penduduk ini sudah mulai dilaksanakan sejak zaman kolonial. Pemerintahan Indonesia baru mulai melanjutkan program ini dari tahun 1950, mengingat transmigrasi adalah jalan yang ditempuh untuk mengatasi keseimbangan dan ketidakmerataan penduduk dan dianggap sebagai sarana pembangunan yang penting (Kusumaatmaja, 1978). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian (Merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1972 tentang Pokok-pokok Transmigrasi), yaitu penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengingat program ini sangat penting dan menjadi utama untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan, maka sudah seharusnya program ini terus dilaksanakan dan dikembangkan untuk terus menjadi lebih baik. Keberhasilan program ini di masa lalu dijadikan contoh untuk masa yang akan datang untuk dapat terus dikembangkan. Harus diakui, permasalahan seputar transmigrasi sangat kompleks, mulai dari tahap perencanaan, penyiapan lahan, sampai dengan penempatan dan pasca penempatan. Penyiapan dan penyediaan lahan yang terkait dengan pembukaan lahan, perlu memperhatikan dampaknya terhadap kerusakan dan kelestarian lingkungan, serta kecocokan lahan untuk usaha pertanian yang akan dikembangkan. Kecenderungan munculnya konflik dengan penduduk lokal juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Lokasi transmigrasi yang eksklusif dapat menyebabkan hubungan yang kurang harmonis antara transmigran dengan masyarakat setempat. Selain itu, perbedaan latar belakang budaya juga menjadi tantangan, sehingga isu-su seperti

jawanisasi dan islamisasi mengemuka dalam wacana program transmigrasi. Selanjutnya, desentralisasi atau otonomi daerah juga menyebabkan program transmigrasi kurang populer, karena beberapa daerah penerima masih kurang mendukung terutama untuk menyediakan lahan lokasi transmigrasi (Pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi DPR RI, 2012).

Namun transmigrasi tetap menjadi program yang terus direalisasikan untuk mengurangi penduduk sampai saat ini. Adapun pulau-pulau yang dituju sebagai lokasi transmigrasi adalah pulau yang masih sedikit penduduknya yang terletak di luar Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang cukup pesat dan juga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah melalui kebijakan otonomi daerah, maka pulau-pulau yang tadinya menjadi tujuan program transmigrasi telah berkembang kemudian harus dibatasi penerimaan transmigran didalamnya. Salah satu pulau yang berkembang itu adalah penduduk Pulau Sumatera, yang sekarang menjadi objek yang akan mengikuti program transmigrasi.

Pemilihan lokasi transmigrasi juga harus berdasarkan asas kelestarian lingkungan hidup utamanya hutan (Arilaha, 2009). Salah satunya Pulau Sumatera yang masih menjadi tempat tujuan transmigrasi yang berlangsung hingga saat ini yaitu Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat menjadi salah satu pilihan tempat transmigrasi dilakukan karena memiliki tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan, seperti yang terdapat di daerah Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung.

Di Provinsi Sumatera Barat, program transmigrasi pertama kali dilaksanakan di Tongar. Tongar merupakan suatu kampung kecil yang terletak di Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat). Kampung ini terletak di tepi jalan antara Talu dan Air Bangis, 170 km di sebelah utara Kota Bukittinggi yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Tengah sewaktu lokasi transmigrasi ini dibuka pada tahun 1954 (Witrianto, 2015:38). Setelah itu, program transmigrasi juga dilaksanakan di wilayah-wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Barat, juga menjadi tempat tujuan pembangunan daerah program transmigrasi. Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung dilakukan di

beberapa wilayah, yaitu di Sitiung (sekarang Kabupaten Dharmasraya), Timpeh (berada di antara Kenagarian Kunangan Parik Rantang dengan Nagari Kamang Makmur) dan Desa Sungai Tenang (Suparmi, 2020:93).

Program transmigrasi dimulai di Kabupaten Sijunjung pertama kali pada tahun 1973 yaitu di Desa Sungai Tenang, Kecamatan Kamang Baru. Program transmigrasi yang terbaru saat ini di tahun 2016, ditempatkan di Kabupaten Sijunjung tepatnya di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru. Kabupaten Sijunjung dijadikan sebagai tempat berlangsungnya program transmigrasi karena masih luasnya lahan kosong yang subur yang belum dikelola dengan baik dan masih sedikitnya jumlah penduduk yang mendiami wilayah yang cukup luas tersebut. Pola transmigrasi yang berlangsung di Nagari Padang Tarok adalah transmigrasi umum dan transmigrasi lokal. Transmigrasi Umum adalah program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhannya oleh pihak pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Sementara itu transmigrasi lokal adalah perpindahan penduduk dalam satu daerah saja. Pindahannya bersifat setempat, misalnya dari satu provinsi ke provinsi lainnya dan bahkan dalam satu provinsi sekalipun. Mereka yang mengikuti transmigrasi umum, setelah sampainya di daerah tujuan mereka akan mendapatkan tanah pertanian seluas 2 hektare, 1 bangunan rumah, beberapa bibit tanaman, serta diberikan jaminan hidup selama 12 bulan.

Berdasarkan profil Nagari Padang Tarok, sebelum datangnya masyarakat transmigrasi, wilayah Padang Tarok sebagai tempat rencana transmigrasi ini dibangun, dahulunya adalah hutan belantara dengan pohon besar yang belum terkelola dan berbagai binatang buas di dalamnya. Nagari Padang Tarok merupakan dataran rendah dengan sedikit berbukit-bukit serta tanahnya yang relatif subur. Kemudian daerah ini dijadikan sebagai tempat tujuan program transmigrasi dan mulai dibangun pada tahun 2013 dengan luas 711 Ha dan target penempatan 300 KK. (Depnakertrans Kabupaten Sijunjung).

Dalam pembangunan program transmigrasi, dilakukan penyerahan tanah ulayat secara sukarela oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Nagari Padang Tarok yang diwakilkan oleh para niniak mamak. Penyerahan tanah ulayat secara sukarela ini yang kemudian diperuntukan pembangunan transmigrasi tersebut

dilakukan pada Rabu, 3 Agustus tahun 2005 oleh niniak mamak serta Wali Nagari Padang Tarok kepada Bupati Sijunjung. Dalam penyerahan tanah ulayat tersebut, dibuatlah surat kesepakatan antara niniak mamak Nagari Padang Tarok bersama Pemerintah Kabupaten Sijunjung terkait untuk pelaksanaan program transmigrasi. Pada akhirnya kesepakatan ini kemudian membuahkan hasil dengan sebuah surat kesepakatan bersama antara niniak mamak bersama dengan pihak pemerintahan. Dalam surat pernyataan bersama antara niniak mamak pemangku adat dengan pemerintah, telah disepakati beberapa ketentuan terkait pelaksanaan program transmigrasi yang ada di Nagari Padang Tarok. Untuk semua pendatang diharuskan menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh tokoh-tokoh adat, serta harus mampu menghormati keyakinan dan adat istiadat Minangkabau yang dimiliki oleh komunitas lokal setempat (infopublik.sijunjung.go.id).

Transmigrasi Padang Tarok terbilang transmigrasi yang langka, mengingat program transmigrasi saat ini yang telah jarang diadakan. Kesulitan mengenai tempat dan lahan untuk dijadikan lokasi transmigrasi, menjadi alasan utama mengingat saat sekarang sulitnya menemukan lahan kosong dan luas yang cocok dijadikan tempat transmigrasi. Transmigrasi Padang Tarok adalah program transmigrasi terbaru dari Pemerintah Indonesia yang dimulai sejak tahun 2016. Melalui Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sijunjung. Pemerintah daerah melakukan kerja sama dalam kegiatan tersebut. Target penempatan transmigran berjumlah 300 KK, rumah yang telah dibangun untuk transmigran Padang Tarok sebanyak 240 unit. Dengan tawaran rumah dan lahan gratis, serta jaminan hidup yang diberikan selama 12 bulan, diharapkan sebagai bentuk daya tarik masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam program transmigrasi tersebut. Karena program transmigrasi ini masih berada dalam masa pembangunan, maka penempatan transmigran ke Padang Tarok dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018. Hinga saat ini, terdapat 221 KK (836 jiwa) yang menempati daerah Transmigrasi Padang Tarok. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Transmigrasi yang ditempatkan di Padang Tarok
Tahun 2016 dan 2018

Penempatan 2016				Penempatan 2018			
PTL	Jumlah	PTA	Jumlah	PTL	Jumlah	PTA	Jumlah
Padang Tarok	12 KK	Kabupaten Progo	5 KK	Padang tarok	61 KK	Provinsi Jawa Tengah	120 KK
Kabupaten Agam	5 KK	Kabupaten Tegal	5 KK			Provinsi Jogjakarta	10 KK
Kabupaten Padang Pariaman	3 KK						

Ket : PTL (Penduduk Transmigrasi Lokal)

PTA (Penduduk Transmigrasi Asal)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung 2020

Sebagaimana yang terdapat di dalam tabel 1.1, masyarakat transmigran Padang Tarok bukan saja berasal dari sebagian besar penduduk Suku Jawa yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah saja. Namun transmigran tersebut juga berasal dari penduduk Suku Minangkabau dari berbagai daerah di Sumatera Barat yaitu dari Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan tentunya juga masyarakat lokal Nagari Padang Tarok itu sendiri. Penduduk yang berasal dari daerah Sumatera Barat ini adalah penduduk yang terkena dampak longsor yang kemudian dijadikan peserta dalam transmigrasi Padang Tarok. Berbeda halnya dengan penduduk dari Padang Tarok itu sendiri, mereka adalah penduduk yang memiliki tanah di tempat pembangunan transmigrasi dan sebagai bentuk terima kasih, maka pemerintah juga memberikan bagian kepada masyarakat untuk dapat menempati kawasan transmigrasi dengan mendapatkan rumah, lahan serta bibit yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat transmigrasi.

Salah satu identitas dan karakteristik yang paling nyata dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Sehingga tidak heran kalau dalam proses komunikasi sosial, kontak sosial dan hubungan sosial senantiasa ditandai oleh konstalasi kehidupan yang cenderung harmonis pada satu sisi dan kerap kali disharmonis pada sisi lain. Kebudayaan Minangkabau adalah kebudayaan yang unik. Apabila kebanyakan budaya menganut sistem patrilineal sebagai sistem kekerabatannya, maka kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal (Munir, 2015:3). Etnis Minangkabau merupakan kelompok etnis

nusantara yang berbahasa dan menjunjung tinggi adat Minangkabau. Bahasa yang digunakan yakni bahasa yang penuh dengan kiasan yang bersifat tegas dan terkandung *petatah - petitih*. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai ciri khas, mulai dalam hal kesenian yaitu berupa silat dan tarian khas Minangkabau. Minangkabau juga kaya akan rempah-rempah dan cita rasa pedas, serta adat ini sangat menjunjung tinggi seluruh hukum adat istiadatnya sesuai dengan petatah Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang memiliki makna syariat agama islam berdasarkan Alqur-an dan Hadist.

Berbeda halnya dengan Suku Jawa, dalam sistem kekerabatan, Suku Jawa merupakan penganut patrilineal (menurut garis keturunan ayah). Dalam hal kebiasaan dan tingkah laku, budaya Jawa mengajarkan nilai-nilai tata krama yang tinggi, sopan santun, berbicara lembut dan ketekunan. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan sejarah dan masyarakatnya yang dulu hidup dalam sistem kerajaan – kerajaan. Jadi kebiasaan seperti itu tetap mendarah daging bagi masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupannya, meski telah terjadi peralihan kepercayaan dari animisme, hindu budha dan sekarang menjadi islam (Subqi, dkk. 2018 : 2-5).

Pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri, bahwa interaksi sosial yang terjalin di antara kedua etnik dengan berbagai latar belakang yang berbeda, sangat rentan untuk terjadinya konflik. Dalam memperlakukan sebuah perbedaan bukan berarti setiap individu harus mengenali dan memiliki identitas pribadi yang kuat dengan sistem nilai yang jelas, namun tidak untuk merendahkan orang lain (Moeis, 2014:30). Hakikat multikultural yaitu tidak mengarahkan orang melihat kepada persamaan atau kebaikan masing-masing untuk diakui satu sama lain, tetapi yang diperlukan adalah kedewasaan untuk melihat dan mengenali diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain yang berbeda. Tentu untuk menjadi masyarakat yang multikultur, masyarakat transmigran Padang Tarok memerlukan sebuah proses tantangan dan strategi adaptasi sebagai solusi agar dapat menjalani kehidupan yang baik, terlebih lagi Padang Tarok merupakan wilayah yang baru dengan segala bentuk kehidupan baru yang harus mereka jalani. Ketika masyarakat transmigran datang dan menetap di Padang Tarok, mereka dihadapkan oleh berbagai permasalahan kebudayaan antara kedua etnis yang menetap, sehingga perlu dilakukan penyelesaian dan menemukan solusinya. Menurut

Bennett (1976; 247-248), asumsi dasar adaptasi berkembang dari pemahaman yang bersifat evolusionari yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara biologis atau genetic, maupun secara sosial dan budaya. Adaptasi sosial merupakan kesanggupan individu untuk dapat bereaksi secara efektif dan harmonis terhadap realitas dan situasi sosial, serta bisa menjalin hubungan sosial yang sehat.

Proses adaptasi telah dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian mengenai transmigrasi tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh Nova (2016) tentang *dampak transmigrasi terhadap kehidupan sosial masyarakat; studi sejarah masyarakat timpeh Dharmasraya*. Nova dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses adaptasi dapat dilakukan dengan baik antara transmigran Suku Jawa dengan Suku Minangkabau. Dalam proses adaptasi tersebut mereka dapat membangun persaudaraan yang kokoh yang dibangun atas dasar identitas yang sama, artinya masyarakat menyadari bahwa mereka adalah sama yang memilih untuk menjalani dan menghabiskan kehidupan di daerah yang baru, yaitu daerah Timpeh yang berada di Kabupaten Sijunjung. Masyarakat beranggapan bahwa mereka bukanlah berbeda secara tempat asalnya, namun mereka menyadari bahwa mereka adalah penduduk daerah yang ditempati saat ini tanpa membedakan identitas dan dari mana mereka berasal. Rata-rata penduduk Timpeh adalah penduduk transmigrasi sehingga dengan kesadaran tersebut dapat membuat masyarakat melahirkan istilah Minangkabau baru.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2015) tentang *Strategi Adaptasi Transmigran Suku Jawa Di Daerah Tujuan Transmigrasi (Studi Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)*. Terlihat bahwa pilihan pekerjaan merupakan kunci utama untuk membuat masyarakat transmigran mempertahankan kelangsungan hidup mereka, mulai dari menjadi petani sayur dan petani padi, karena dua hal ini dianggap masyarakat sebagai tanaman yang bisa panen dalam jangka pendek. Kemudian proses interaksi yang dilakukan masyarakat yakni dengan menggunakan nilai-nilai yang ditanam dalam diri manusia sejak dini, seperti bagaimana cara bertutur kata yang sopan, dan untuk budaya pada penelitian ini terjadi akulturasi bisa terlihat

dalam prosesi pernikahan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi beragama dan adat dari masing-masing etnis tersebut.

Dalam beradaptasi kunci utama yang diperlukan oleh individu adalah melakukan interaksi sosial dan sosialisasi. Hal ini dikarenakan interaksi sosial merupakan kunci utama dari semua kehidupan sosial. Pergaulan hidup dapat terjadi apabila orang-perorangan, atau kelompok-kelompok manusia saling berbicara dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selain itu, menurut Soekanto, (2005:61) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dan kelompok manusia. Mengingat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan agar dapat bertahan hidup. Hidup di lingkungan yang baru tentu tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini karena di lingkungan yang baru mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lingkungan yang lama, baik adat istiadat, karakteristik lingkungan fisik, karakteristik masyarakatnya, cuaca dan iklim, serta perbedaan lainnya. Dalam proses menjalani kehidupan para transmigran dihadapkan oleh berbagai permasalahan seperti permasalahan dialek yang berbeda. Kesulitan antar etnis dalam memahami makna ketika berbicara satu sama lain, permasalahan ekonomi yang sulit ketika jaminan hidup telah habis, sedangkan lahan belum bisa panen, sarana prasarana yang tidak memadai, pendidikan yang rendah, serta tenaga kesehatan yang minim. Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut banyaknya transmigran yang memilih keluar lokasi transmigrasi untuk mencari pekerjaan, dan bahkan pulang ke kampung halaman mereka dan meninggalkan lokasi transmigrasi.

Berbagai permasalahan ini terlihat dari beberapa daerah transmigrasi salah satunya yang telah dipaparkan dalam penelitian Ningsih, dkk (2015) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Transmigran yang masih bertahan tentu melakukan adaptasi sehingga menemukan penyelesaian dari permasalahan dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Transmigran Padang Tarok untuk memulai kehidupan dan dapat menjalani kehidupan tersebut, tentu juga akan melakukan sebuah penyesuaian dan membentuk sebuah tatanan sosial yang baru sebagai masyarakat pendatang yang memilih menetap di Padang

Tarok. Hal ini dilakukan demi pendekatan sehingga dapat menjalani kehidupan tanpa hambatan. Terlebih lagi hal ini bertujuan agar untuk dapat menjadikan masyarakatnya memiliki rasa toleransi tinggi, walaupun berada dalam etnis yang berbeda, serta minim terjadinya konflik yang diakibatkan oleh kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk menuju masyarakat yang multikultural, maka perlu ditemukan strategi-strategi dalam menyelesaikan tantangan ketika berhadapan dengan lingkungan yang baru demi terciptanya tatanan sosial yang baru. Sebagaimana mereka adalah masyarakat pendatang yang menempati suatu kawasan baru serta bersama-sama menjalani kehidupan, maka secara tidak langsung akan terbentuk sebuah tatanan sosial yang baru. Maka kajian inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui bagaimana masyarakat transmigran dalam membangun tatanan sosial baru untuk mewujudkan masyarakat multikultur di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari Padang Tarok adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung yang penempatannya dimulai sejak tahun 2016. Pada transmigrasi ini terdapat dua kelompok etnis yakni Etnis Minangkabau dan Etnis Jawa. Untuk menuju masyarakat yang multikultur dan dapat membangun tatanan sosial yang baru, masyarakat transmigran Padang Tarok memerlukan sebuah solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada di lingkungannya, terlebih lagi Padang Tarok merupakan wilayah yang baru dengan segala bentuk kehidupan baru yang harus mereka jalani, mulai dari karakteristik yang berbeda dengan lingkungan yang lama, adat istiadatnya, lingkungan fisik, karakteristik masyarakatnya, cuaca dan iklim, serta permasalahan sosial lainnya.

Transmigran dari kedua etnis ini menemukan kesulitan dalam menjalin interaksi sosial dengan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki tersebut. Akibatnya transmigran Padang Tarok hidup berkelompok sesuai dengan etnis dan latar belakang yang sama saja. Hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus tentu akan dapat menghambat perkembangan adaptasi pada masyarakat transmigran Padang Tarok. Perbedaan tersebut tentu juga akan mengganggu sistem kehidupan sosial dalam bermasyarakat jika tidak segera diatasi. Maka perlu dilakukan segera ditemukan solusi terhadap permasalahan karakteristik yang berbeda di Padang

Tarok tersebut. Perlu dilakukan sebuah penyelesaian masalah demi terbangunnya sebuah tatanan sosial baru yang terus digunakan dan dilestarikan di Nagari Padang Tarok. Maka dari itu, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah ***Bagaimana membangun tatanan sosial baru untuk mewujudkan masyarakat multikultural di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung?***

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dibagi dua: Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana masyarakat transmigran membangun tatanan sosial baru untuk mewujudkan masyarakat multikultural di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan tantangan masyarakat transmigran membangun tatanan sosial untuk mewujudkan masyarakat multikultural di Nagari Padang Tarok
2. Mendeskripsikan respon dari tantangan yang digunakan masyarakat transmigran untuk membangun tatanan sosial untuk mewujudkan masyarakat multikultural di Nagari Padang Tarok

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama strategi dan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Aspek Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran sekaligus menjadi bahan acuan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memajukan serta lebih memantapkan program transmigrasi di kemudian hari, baik secara wilayah dan gambaran kendala yang dirasakan oleh transmigran, agar program ini tetap berlanjut dengan

pertimbangan yang lebih matang untuk ke depannya, serta dapat terwujudnya masyarakat multikultural di Indonesia



